

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan komponen demokrasi yang penting. Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk meminta pertanggung jawaban kepada para pengambil keputusan. Pemilu menjadi sarana warga negara untuk memberhentikan para pemimpin dari jabatannya dan menggantinya dengan wakil-wakil mereka yang baru dipilih atau memperbarui masa jabatan mereka. Pemilu dimaknai sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu merupakan sarana untuk mempersatukan karena pasca pemilu siapapun yang menang atau kalah dalam sebuah kontestasi akan bersama-sama menanggung beban untuk menjaga keutuhan dan kelestarian negara yang demokratis.

Akan tetapi, saat ini demokrasi sedang mengalami penurunan. Secara global, beberapa negara mengalami kemunduran demokrasi ketika berada di bawah tekanan *COVID-19*. Wabah *COVID-19* memperburuk tantangan teknis, operasional, dan keuangan yang dihadapi lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa negara menerapkan pandemi ini untuk mengganggu proses pemilu. Beberapa negara memberlakukan pembatasan *COVID-19* untuk menggagalkan kampanye bebas untuk suksepsi politik demokratis di negara tersebut dan di tingkat partai politik. Penerapan langkah-langkah partisan dan otoriter selama *COVID-19* berdampak signifikan terhadap kinerja beberapa badan penyelenggara pemilu (James et al., 2023).

Penurunan demokrasi juga terjadi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia telah mengukir beberapa masalah yang berdampak pada keutuhan demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai badan penyelenggara pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa masalah. Pertama, Ketua KPU RI Hasyim terbukti melakukan pelanggaran etik dengan bertemu dengan peserta pemilu. Kedua, Hasyim tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan masyarakat sipil. Ketiga, pelanggaran etik soal proses pendaftaran dan pencalonan Capres-Cawapres 2024. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hasyim selaku Ketua KPU RI ini di validasi oleh DKPP dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Capres-Cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres (Kompas, 6 Februari 2024).

Dilansir dari portal berita *bbc.com* masih ditemukan kembali beberapa permasalahan yang di alami oleh KPU. Pada berita tersebut menyatakan bahwa sentimen percakapan terkait Sirekap di X terpantau sangat negatif, sebanyak 85% dan positif hanya 7% dari hasil tersebut ada dugaan bahwa warganet menilai ada unsur kesengajaan dalam perubahan data di Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Hal ini tentu menimbulkan keraguan terhadap legitimasi penyelenggara pemilu. Masyarakat juga merasa KPU tidak kompeten dalam mengelola data pemilu, tidak transparan dalam menampilkan data pemilu dan merasa bahwa data yang ditampilkan tidak dapat dipercaya.

Setidaknya ada 3 dugaan kecurangan yang terjadi dan mengapa terjadi ketidakpercayaan masyarakat pada proses penyelenggaraan pemilu 2024 kali ini. Pertama, adanya *cross-checking* data atau proses membandingkan atau memverifikasi data dengan sumber utama. Hal tersebut diperkuat adanya dugaan penggelembungan suara salah satu paslon nomor 02 yang sempat viral di media sosial. Sebuah video yang viral terjadi di TPS 54, kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang terjadi adalah di formulir C hasil penghitungan suara yang asli perolehan suara paslon 02 Prabowo-Gibran tertulis 74 (Warta Kota Produ, 16 Ferburari 2024).

Kedua, masalah Sirekap, yakni pada keesokan harinya Kamis 15 Februari 2024 data yang tercantum di Sirekap adalah 748. Kemudian peneliti mencoba mencari informasi bahwa sudah di perbaiki oleh KPU Jakarta Timur pada hari Jumat 16 Februari 2024 sesuai perolehan suara ketiga paslon pada formula C hasil (Warta Kota Produ, 16 Ferburari 2024).



Gambar 1. Youtube Warta Kota Produ
Sumber: Capture Youtube Warta Kota Produ, 2024

Ketiga, ada kecurangan yang dilakukan oleh saksi. Pelaku diduga melakukan pencoblosan sisa surat suara. Saksi lalu menolak yang dilakukan pelaku, protes, kemudian marah, dan lakukan pemukulan terhadap korban. Kejadian ini telah terjadi di TPS 5, Kelurahan Banjar Bali Buleleng (Detik.com, detikbali, 15 Februari 2024).



Gambar 2. Salah Satu Contoh Permasalahan Demokrasi
Sumber: detik.com/bali, 2024

Capture video di atas adalah juga menunjukkan permasalahan demokrasi tentang terbukti benar adanya kesalahan input data, antara formulir C dengan Sirekap. Video ini kemudian menjadi viral sampai di keesokan harinya datanya sudah diperbaiki oleh KPU Jakarta Timur (detik.com/bali, 2024). Data dari Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) kepada Kompas TV menyatakan bahwa selama ini masyarakat tidak mendapatkan informasi dengan baik mengenai keamanan aplikasi Sirekap. Kemudian di tambah juga ada keterbatasan soal waktu untuk KPU menemukan hasil Pemilu maksimum tiga hari setelah pemungutan suara (Kompas.TV, 16 Februari 2024).

Seharusnya hal ini dapat diantisipasi dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Sekelas Komisi Pemungutan Suara Republik Indonesia (KPU RI) seharusnya minim sekali kesalahan, tetapi justru yang terjadi banyak kesalahan input ke Sirekap. Dampak dari ketidaksiapan KPU menjadi tambahan faktor yang disuarakan oleh masyarakat melalui Perludem jangan sampai dugaan hasil Pemilu 2024 dicurangi karena KPU tidak siap dalam konteks penggunaan Sirekap, apabila

publik tidak di infokan audit Jakarta, Kompas.TV yang ditulis pada portal berita Perludem.

Politik identitas juga terjadi pada Pemilu 2024 walau tidak seekstrim pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang sangat kuat. Suryaningsih dan Fadilla (2023) mengatakan bahwa setiap pemimpin yang dipilih harus berdasarkan agama yang sama dengan pemilih. Mayoritas agama yang dimiliki oleh masyarakat yaitu agama Islam.

Politik identitas tidak menjadi fokus pada penelitian ini, akan tetapi memberikan pandangan bahwa politik identitas di pemilu 2024 ini tidak dimainkan, namun politik identitas hanya untuk membangun reputasi seorang kandidat atau partai politik tertentu. Sehingga isu tentang politik identitas berkaitan dengan upaya membranding dirinya sendiri (Meliala, 2020).

Dengan banyaknya permasalahan tersebut, akan tetapi pemerintah menyadari pentingnya menyediakan layanan secara elektronik dengan berbagai situs dan aplikasi yang terkoneksi internet guna meningkatkan kinerja layanan pemerintah yang diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan yang berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi lembaga pemerintahan (Rahmanto, 2022).

Media menjadi sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada *audience* baik media massa, media sosial, maupun media *online* dapat menjadi aset penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu tentang penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Konteks besar dalam penelitian ini adalah komunikasi

politik yang memiliki peran penting untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemilu 2024. Peran media komunikasi berkontribusi untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Interaksi antara komunikasi politik dan media untuk memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sehingga publik memiliki kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan dapat mempertimbangkan opsi dan keputusan politik. Kontribusi media yang membentuk proses demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan hak pilih mereka. Media berguna untuk merancang mengelola strategi komunikasi yang tepat (Nurhayati, 2023).

Gessler & Kaftan (2023), kritik mempunyai nilai informasi dan menentukan standar mana yang diterapkan masyarakat dalam mengevaluasi usulan kebijakan tertentu. Kritik khusus mendorong masyarakat untuk membuat pertimbangan yang mungkin tidak mereka miliki dan menerapkan standar evaluatif yang berbeda terhadap suatu masalah dibandingkan yang seharusnya mereka lakukan sebelumnya, yang paling penting mereka dapat mempertimbangkan konsekuensi demokratis dari usulan yang awalnya tampak seperti perubahan teknis. Terdapat sejumlah faktor media komunikasi yang memengaruhi persepsi publik tentang penyelenggaraan pemilu 2024 yaitu media massa, media sosial, dan media *online* yang merupakan konteks besar dalam penelitian ini yang dikategorikan pada komunikasi politik.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena pemilu menjadi kunci demokrasi yang berjalan di Indonesia, namun pada praktiknya di pemilu 2024 KPU (Komisi

Pemilihan Umum) telah melakukan beberapa pelanggaran. Dengan peran dari media komunikasi yang mewarnai proses pemilu 2024 memberikan dampak yang luar biasa, bahkan dengan adanya media justru memperkeruh keadaan saat ini, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan pemilu yang adil, transparan, dan kredibel. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana media memengaruhi persepsi publik tentang penyelenggaraan pemilu.

Pemilu 2024 tidak terlepas dari peran media massa, media *online*, dan media sosial dalam membentuk opini publik. Media massa seperti televisi merupakan sumber informasi utama bagi warga negara, sementara media *online* dan media sosial menawarkan akses informasi yang cepat dan luas, akan tetapi juga berpotensi menyebarkan disinformasi dan berita palsu (*hoax*).

Informasi atau berita yang disampaikan melalui media menimbulkan persepsi publik yang positif terhadap penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan mendorong partisipasi pemilih. Namun, disinformasi dan pemberitaan yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi partisipasi. Oleh karena itu, memahami bagaimana berbagai jenis media memengaruhi persepsi publik adalah hal yang krusial.

Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor media komunikasi yang paling berpengaruh dalam membentuk persepsi publik. Dengan demikian, KPU dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan informasi yang akurat dan kredibel sampai kepada masyarakat, serta

mengatasi tantangan disinformasi. Serta juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar semakin cerdas serta selektif dalam memilih dan memilah media komunikasi tentang penyelenggaraan pemilu. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang tranparan, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat.

Media massa menjadi salah satu *instrument* penghubung atau corong bagi kandidat untuk menyampaikan program maupun kebijakan yang ditempuh oleh setiap individu. Namun perlu dipahami bahwa hubungan antara media massa dengan kontestan ini terkadang tidak bersifat netral, bisa saja terjadi media massa memberikan gambaran yang bias tentang seorang kontestan atau partai (Meliala, 2020). Salah satu penyebab karena banyak media *mainstream* dimiliki oleh para politisi, menteri, termasuk mantan menteri. Seperti Metro TV dan Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh, MNC Group punya Hary Tanoesoedibjo, TV One dan ANTV punya Aburizal Bakrie, Republika punya Erick Thohir, juga Trans TV Group yang dimiliki Chairul Tanjung. Para oligarki media ini, sebagaimana penelitian Ross Tapseel dalam Kuasa Media di Indonesia (2018) terungkap, mereka sering memanfaatkan media untuk kepentingan politik. (Bawaslu Provinsi Maluku Utara). Ketika jurnalisme telah diintervensi kepentingan komersial pemilik media, maka *audiens* tidak akan pernah menemukan suatu proses pemberitaan yang benar-benar bersifat netral (Musfialdy, 2015).

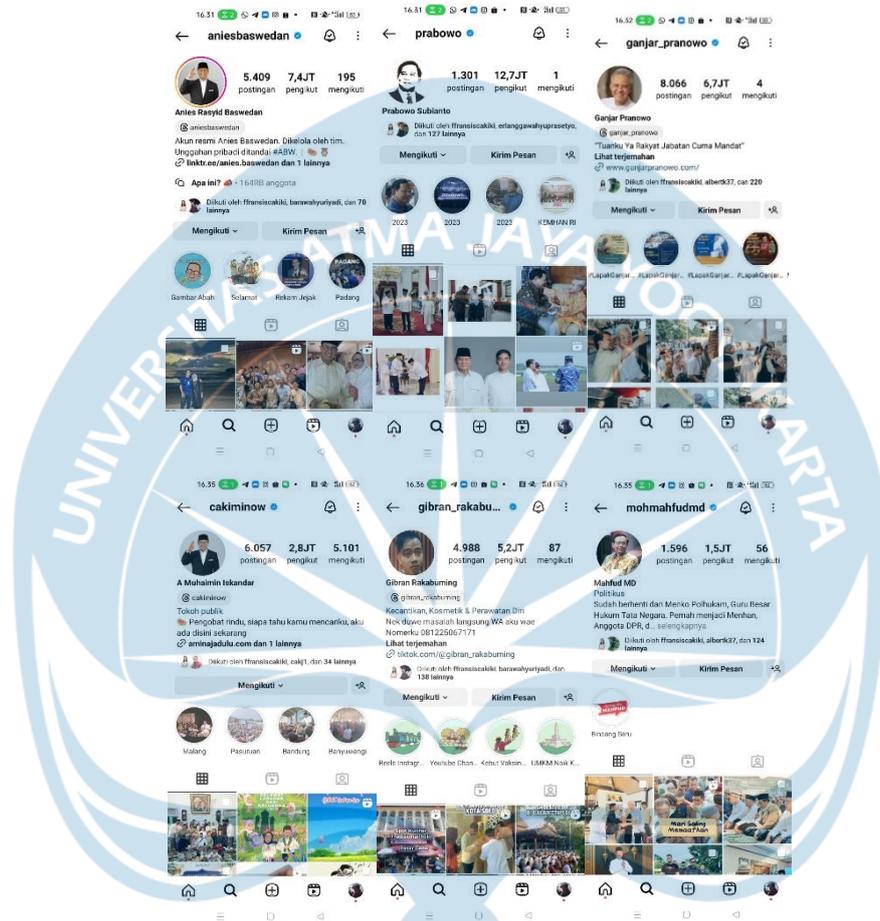


Gambar 3. Salah Satu Contoh Ketidaknetralan Media
Sumber: tvOneNews, 2024

Media sosial yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*). Nasrullah (2017) media sosial telah menjadi panggung utama dalam membentuk persepsi publik mengenai penyelenggaraan pemilu 2024. Sejumlah faktor dari media sosial turut memainkan peran penting dalam proses ini. Berdasarkan hasil riset peneliti pada sebuah jurnal menyatakan bahwa media sosial justru di persepsi berkontribusi lebih besar pada aspek partisipasi dibandingkan transparansi dan akuntabilitas (Rahmanto, 2022). Pada media sosial mampu meningkatkan transparansi pemerintah dan interaksinya dengan masyarakat. Dengan demikian media sosial menjadi ruang komunikasi yang interaktif dan instan serta dampaknya langsung bisa di rasakan oleh pengguna media sosial itu sendiri. Salah satu sifat teknologi media sosial yang semakin luas dapat menciptakan cara baru partisipasi yang demokratis, terbuka, transparan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Marpianta & Hendriyani, 2019).

Pesan melalui gambar menunjukkan bagaimana Instagram memengaruhi cara para pemimpin politik berkampanye, memerintah, dan menjalin hubungan dengan rakyatnya. Politisi berinteraksi dengan pengikutnya untuk meningkatkan layanan atau berbagi pendapat pribadi. Ketika terhubung dengan internet, aktivitas politik akan terfokus pada frekuensi responden mengakses informasi politik, jenis media

yang digunakan untuk mengakses informasi politik, dan berbagai jenis informasi politik yang diakses (Beriansyah & Qibtiyah, 2023).



Gambar 4. Instagram Masing-Masing Capres-Cawapres Saat Bermedia Sosial
Sumber: Instagram masing-masing Capres-Cawapres, 2024

Pemberitaan di media *online* tidak jarang dimanfaatkan oleh para elit dalam mengkampanyekan gagasan dan ideologi nya menjadi lebih masif, demokratis, dan dapat dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat (Hyun, 2017), sebagaimana pemberitaan isu-isu politik yang di seminasikan melalui pemberitaan media *online*. Pemberitaan media *online* memiliki sumber daya yang luas dari pada pemberitaan media konvensional, sehingga media *online* dapat digunakan dalam

mendiseminasikan gagasan dan pandangan penggunaannya secara massif (Larasati & Fernando, 2023).



Gambar 5. Bukti KPU dan Viva Group Menunjukkan Keberpihakan Pada Salah Satu Capres-Cawapres Tertentu

Sumber: www.viva.co.id/berita/nasional 2024

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh terpaan media massa dan media digital pada persepsi publik tentang penyelenggaraan pemilu Capres-Cawapres 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media massa dan media digital terhadap persepsi publik tentang penyelenggaraan pemilu Capres-Cawapres 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini, dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengaruh media massa dan media digital meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Capres-Cawapres yang transparan, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat pada pemilihan umum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan tentang pengaruh media massa dan media digital terhadap persepsi publik tentang penyelenggaraan pemilu Capres-Cawapres 2024. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pesan-pesan politik disampaikan dan diterima oleh masyarakat, pembuat kebijakan dapat merancang strategi media komunikasi yang lebih efektif untuk kualitas penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat pada pemilihan umum.

